



**DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2013 ini.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan sosial Kota Balikpapan Tahun 2013 ini, berpedoman kepada :

1. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Nomor : 065/1730/Org, tanggal 6 Desember 2013.

Diharapkan dengan adanya LAKIP ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan, dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 24 Februari 2013

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota serta bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Menyadari hal itu dan sejalan dengan Kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan selaku salah satu Instansi Teknis Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel, diperlukan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dalam Tahun 2013 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan telah berupaya mewujudkan ketenagakerjaan yang kondusif dan mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan tetap memberikan pelayanan prima ketenagakerjaan dan sosial, melalui program dan kegiatan-kegiatan, sebagaimana yang dijabarkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini, menuju pada terciptanya suatu pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. ASPEK STRATEGIS	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	4
E. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran (Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran)	8
3. Strategi dan Kebijakan	10
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	11
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	14
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	23
BAB IV. PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. SARAN	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	37
- SK Indikator Kinerja Utama (IKU)	
- Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2013	
- Pengukuran Kinerja Tahun 2013	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Balikpapan.

Dasar Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan. Kemudian dikeluarkan PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan sosial Kota Balikpapan Tahun 2013 ini, disusun dengan berpedoman, kepada :

1. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Nomor : 065/1730/Org, tanggal 6 Desember 2013, tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan LAKIP Tahun 2013.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2009, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan dan bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2009, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan bidang Sosial
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan Sosial
- c. pelaksanaan pelayanan bidang ketenagakerjaan dan Sosial
- d. pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
- e. pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri
- f. pembinaan hubungan industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan
- h. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan atau rekomendasi perizinan bidang ketenagakerjaan dan bidang Sosial
- i. pembinaan ketenagakerjaan dan pembinaan bidang Sosial
- j. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penanggulangan masalah Sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan
- k. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial
- l. pemantauan dan analisa kelayakan pemberian bantuan sosial kepada lembaga yang bergerak di bidang sosial maupun kepada masyarakat penyandang masalah sosial
- m. pelaksanaan pemberian layanan bantuan sosial bagi korban bencana baik bencana alam maupun bencana karena akibat ulah manusia
- n. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. ASPEK STRATEGIS

a. Bidang Pengembangan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja :

1. Kualitas tenaga kerja masih rendah, sehingga ada beberapa lowongan kerja yang belum terpenuhi.

2. Orientasi latihan mengarah pada pasar kerja, sekalipun pada kenyataannya pelaksanaan pelatihan berdasarkan perencanaan dari bawah yang belum tentu efektif.

b. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

1. Masih terbaikannya hak-hak Pekerja Outsourcing.
2. Kurangnya minat pekerja untuk berorganisasi karena keengganan perusahaan dengan kehadiran Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB).

c. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

1. Masih adanya pelanggaran di bidang norma kerja karena kurangnya kesadaran pihak pengusaha.
2. Masih terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, karena kurangnya kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
3. Masih banyak tenaga kerja yang belum diikutkan dalam program Jamsostek karena kurangnya kesadaran dan kemampuan perusahaan.

d. Bidang Sosial

1. Dampak permasalahan sosial yang cukup signifikan dan merupakan akses dari luar daerah Kota Balikpapan diantaranya permasalahan sosial orang terlantar dan pekerja migran. Dalam hubungan ini diperlukan kesamaan pemahaman (visi dan misi) antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur agar bersama-sama menanggulangi permasalahan tersebut.
2. Sejalan dengan perkembangan Kota Balikpapan kearah Kota Metropolitan, permasalahan sosial dan psikologis menimbulkan jumlah penyandang masalah sosial dan psikologis (orang gila), wanita tuna susila dan anak jalanan. Seyogyanya dibutuhkan kerangka pikir lintas sektoral agar jumlah penyandang masalah sosial tersebut dapat ditekan jumlahnya.
3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna sebagai pilar pemberdayaan sosial sangat potensial untuk membantu meningkatkan keberfungsian sosial, namun keberadaannya masih membutuhkan pembinaan yang optimal dari instansi sosial.

Sedangkan analisis isu-isu strategis didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, sebagai berikut :

– Ketenagakerjaan :

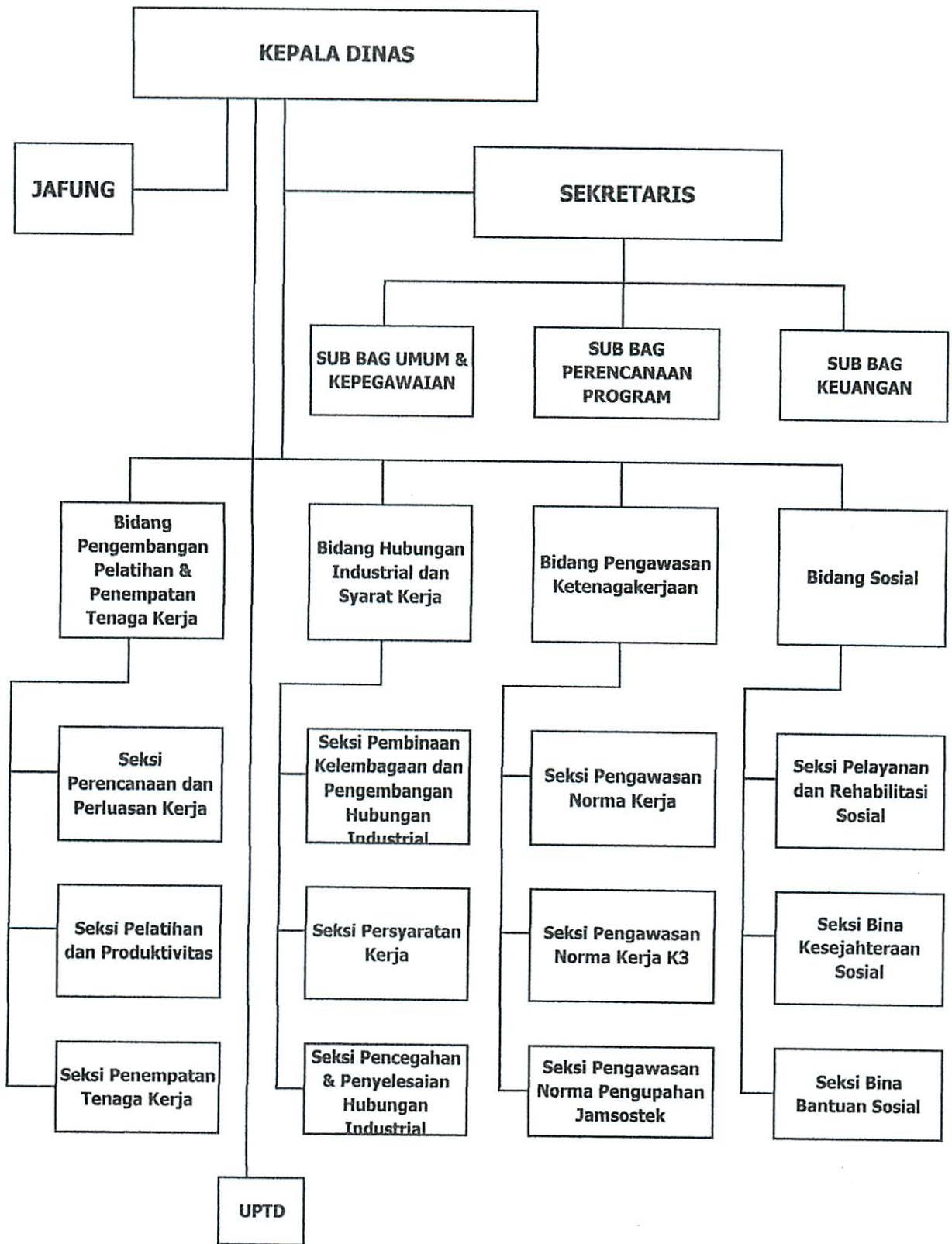
Tingkat pengangguran yang relatif tinggi dan ketersediaan tenaga kerja lokal yang belum memiliki kompetensi keahlian yang memadai sehingga cukup banyak perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja dari luar Balikpapan.

- Sosial :
Belum optimalnya penanganan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon II), 1 (satu) Sekretaris (Eselon III/a), 4 (empat) Kepala Bidang (Eselon III/b), 3 (tiga) Sub Bag (Eselon IVa), 12 (dua belas) Seksi (Eselon IVa), Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai Non Struktural dengan rincian sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN



E. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tugas Pokok dan Fungsi
 - C. Aspek Strategis
 - D. Struktur Organisasi
 - E. Sistematika Penulisan

- BAB II. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja
 - A. Rencana Strategis (Renstra)
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran (Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran)
 - 3. Strategi dan Kebijakan
 - 4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013
 - B. Indikator Kinerja Utama (iku)
 - C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

- BAB III. Akuntabilitas Kinerja
 - A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja
 - B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

- BAB IV. Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan sebagai Organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, perlu secara terus-menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan, dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan harus mempunyai Visi, sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan akan diarahkan, dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Maka Visi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan adalah :

**"Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Kondusif dan Mengentaskan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)."**

Visi tersebut diatas mengandung makna, sebagai berikut :

- Ketenagakerjaan yang kondusif adalah suatu kondisi, dimana baik tenaga kerja maupun pengusaha (perusahaan), bisa saling mendukung dalam suasana yang harmonis.
- Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah segala upaya yang dilakukan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Adapun definisi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dari :

- Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

- Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah golongan masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan, dikarenakan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009).

Untuk mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan, sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, sebagai berikut :

1. Pembinaan Ketenagakerjaan.
2. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Tujuan dan Sasaran (Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, dengan kata lain menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu.

Untuk menjabarkan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dalam tahun 2011-2016 mendatang, diarahkan pencapaian tujuan masing-masing Misi, sebagai berikut :

Misi		Tujuan Strategis	
1.	Pembinaan Ketenagakerjaan	1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
		2.	Meningkatnya pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan
		3.	Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial
2.	Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		5.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan tujuan antara dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem Perencanaan Strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran, berikut ini :

Indikator Tujuan		Indikator Sasaran	
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1.	Peningkatan kualitas tenaga kerja
2.	Meningkatnya pelaksanaan peraturan keternagakerjaan	2.	Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan
3.	Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial	3.	Penurunan perselisihan Hubungan Industrial
4.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4.	Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5.	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Strategi dan Kebijakan

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Strategi :

- a. Peningkatan mutu prasarana dan sarana lembaga pelatihan (BLK, LKK, dll) dan lembaga sertifikasi (Lembaga Sertifikasi Kompetensi/LSK) yang kompeten dan mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Peningkatkan kerjasama kegiatan bursa kerja, pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dengan lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, lembaga ketenagakerjaan swasta/masyarakat.
- c. Memberdayakan dan merevitalisasi lembaga pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta dalam menciptakan tenaga kerja yang mandiri, terampil dan berdaya saing.
- d. Menyediakan/memperluas lapangan kerja bagi pencari kerja yang memiliki kompetensi kerja sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- e. Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia.
- f. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil dalam arti bahwa setiap orang, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berhak memperoleh pelayanan sosial.
- g. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesejahteraan sosial berbasis pekerja sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.

Kebijakan :

- a. Perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya dan usaha produktif.
- b. Peningkatan peran dan kualitas stakeholders dalam perlindungan tenaga kerja.
- c. Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- d. Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja.

- e. Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif dan peningkatan peran lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- f. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.
- g. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2013, adalah sebagaimana pada tabel RKT berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
				Th. 2013
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%
			Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	55%
2.	Meningkatnya pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan	48%
3.	Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial	Penurunan perselisihan Hubungan Industrial	Angka kasus perselisihan hubungan industrial	60%
4.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	70%
5.	Meningkatnya kemandirian PMKS	Peningkatan kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program perberdayaan sosial	70%

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan, sebagaimana tabel berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	1. Angka Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Laporan data ketenagakerjaan Bidang Pengembangan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
	2. Angka Tenaga Kerja yang ditempatkan di perusahaan	
2. Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	Laporan data Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	Angka kasus perselisihan Hubungan Industrial	Laporan data Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
4. Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	Laporan data Bidang Sosial
5. Peningkatan Kemandirian PMKS	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial	Laporan data Bidang Sosial

C. PENETAPAN KINERJA

Tabel Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2013 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%
	2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	55%
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	48%
3. Penurunan perselisihan Hubungan Industrial	Angka kasus perselisihan hubungan industrial	60%
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	70%
5. Peningkatan kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	70%

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kualitas tenaga kerja, maka ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

- a. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
- b. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan

Adapun angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, ditargetkan pada tahun 2013 sebesar 60% dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar ikut pelatihan. Sedangkan jumlah angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan ditargetkan sebesar 55%.

2. Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan

Sedangkan untuk pencapaian peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, maka ditetapkan indikator kinerja utama adalah angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan, dimana pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 48%.

3. Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis penurunan perselisihan Hubungan Industrial, ditargetkan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dengan persentase sebesar 60% pada tahun 2013.

4. Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan terhadap PMKS

Sedangkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), ditargetkan angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial, sebesar 70%.

5. Peningkatan Kemandirian PMKS

Untuk mencapai sasaran peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), ditargetkan indikator kinerja utamanya adalah angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial, sebesar 70%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan dokumen yang berusaha menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja SKPD di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Adapun pengukuran kinerja dari pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan tahun 2013, dapat digambarkan dalam Tabel Pengukuran Kinerja, sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ber-basis kompetensi.	60%	52%	87
	2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	55%	21,52%	39,13
Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	48%	27,84%	58
Penurunan perselisihan Hubungan Industrial	Angka kasus perselisihan Hubungan Industrial	60%	40,20%	67
Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	70%	12,29%	17,56
Peningkatan kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	70%	13,19%	18,84

Sasaran 1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program peningkatan kesempatan kerja, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

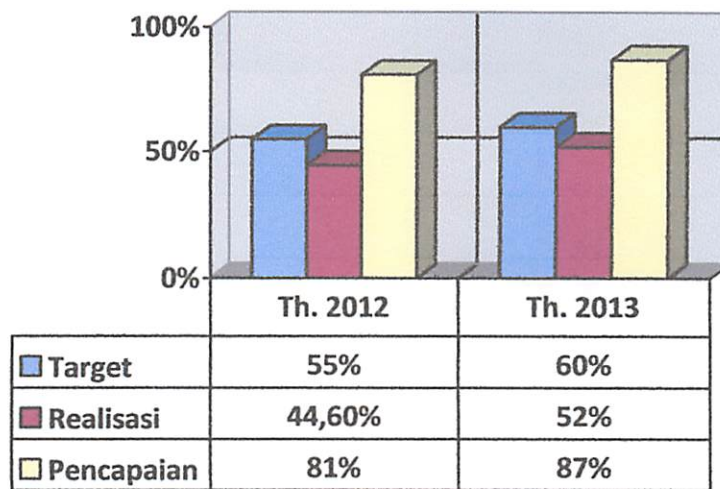
- Pemberdayaan kegiatan pemagangan ke luar negeri
- Pelatihan tenaga kerja di Balikpapan
- Sosialisasi pemagangan dalam negeri
- Job Market Fair (JMF)
- Bimtek Bursa Kerja Khusus
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- Pemberdayaan tenaga kerja sarjana dan tenaga kerja skill
- Pelatihan tenaga kerja Gakin
- Pelatihan Tenaga Kerja UTR Level I & II
- Bimtek Perencanaan Tenaga Kerja Sektor
- Pengumpulan data lowongan dan penempatan
- Pelayanan antar kerja
- Penyuluhan dan pelayanan bimbingan jabatan
- Pembuatan dan penyebaran informasi pasar kerja
- Pendamping Tenaga Kerja Mandiri

Dari Tabel Pengukuran Kinerja di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja di Kota Balikpapan tahun 2013, diukur dari indikator kinerja :

1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dari target 60%, realisasi pada tahun 2013 adalah sebesar 52%, ini berarti pencapaiannya adalah sebesar 87%. Dibandingkan dengan tahun 2012 yang pencapaiannya sebesar 81%, pencapaian pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6%. Dari peningkatan pencapaian sebesar 87% tersebut dapat diungkapkan, bahwa tingkat kompetensi tenaga kerja yang ada sudah cukup tinggi dan semakin membaik dari tahun lalu. Hal ini untuk menjawab akan kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kompetensi, sehingga untuk selanjutnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan bisa merekrut tenaga kerja lokal, karena tenaga

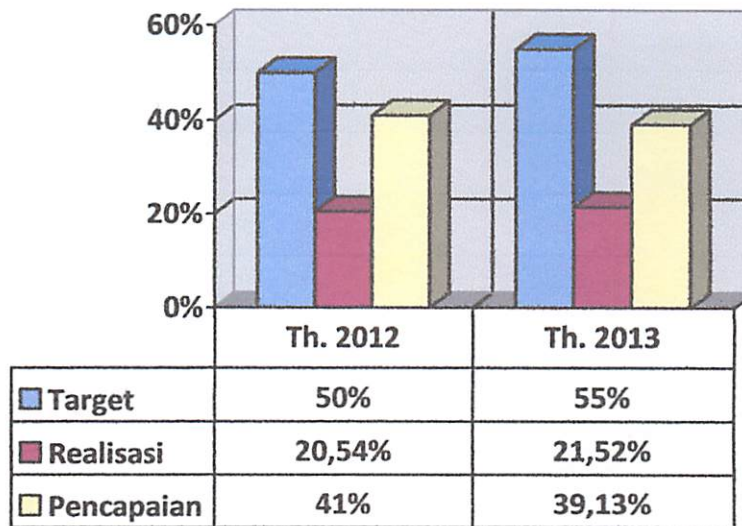
kerja lokal sudah mempunyai kompetensi dan keahlian yang memadai seperti yang dipersyaratkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Grafik 1. Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi:



2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan, dari target pada tahun 2013 sebesar 55%, hanya terealisasi sebesar 21,52%, yaitu pencapaiannya adalah sebesar 39,13%. Tingkat pencapaian tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 lalu, yaitu dari target 50% realisasi sebesar 20,54% atau tingkat pencapaian sebesar 41%. Dari data ini dapat dilihat, bahwa penyerapan tenaga kerja di Kota Balikpapan, baik pada tahun 2012 maupun tahun 2013 masih rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penyebab, diantaranya : 1. Karena masih kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan; 2. Upah tenaga kerja lokal masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar Kota Balikpapan (khususnya dari pulau Jawa), sehingga masih ada perusahaan yang mengambil tenaga kerja dari luar Kota Balikpapan; 3. Ada Perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi tenaga kerja dengan membatasi penerimaan tenaga kerja di perusahaannya.

Grafik 2. Tenaga Kerja yang ditempatkan di perusahaan :



Sasaran 2. Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan

Sasaran ini dicapai melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan program pembinaan kelembagaan dan hubungan industrial, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

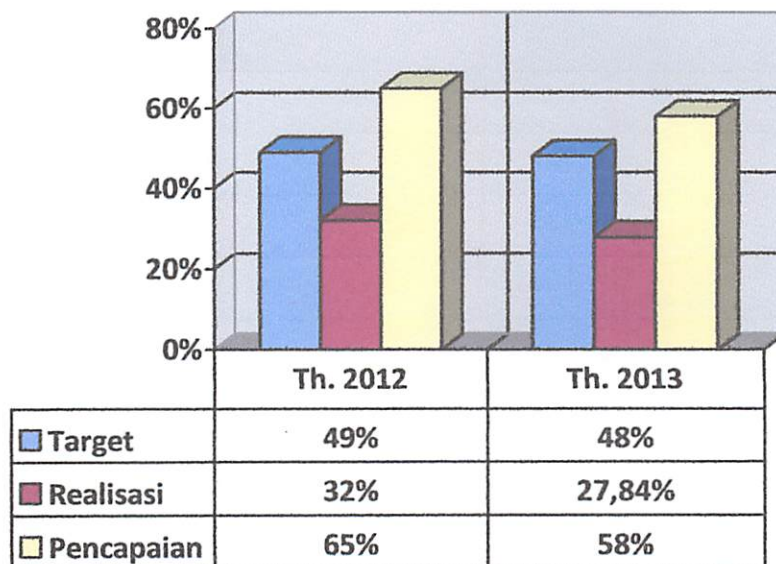
- Pemeriksaan pertama, ulang/berkala atau khusus/kasus
- Penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan
- Penerapan aturan perundangan pekerja perempuan di sektor formal
- Kampanye Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Pembinaan Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- Pembinaan perusahaan jasa K3 (PJK3)
- Sosialisasi perundangan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
- Penyuluhan peningkatan pemahaman program Jamsostek bagi tenaga kerja di dalam dan di luar hubungan kerja
- Bimtek norma waktu kerja dan waktu istirahat di sektor pertambangan & migas
- Penyuluhan penegakan hukum norma pengupahan
- Penyuluhan peningkatan kesejahteraan karyawan di perusahaan
- Verifikasi SP/SB keanggotaan kelembagaan Hubungan Industrial
- Penegakan hukum berbagai peraturan pelaksanaan JPK tenaga kerja

- Pengawasan potensi kepesertaan program JPK di luar Jamsostek
- Pendataan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
- Pengelolaan lahan parkir pusat perbelanjaan dan gedung bertingkat yang berstandar K3
- Pemantauan satgas tunjangan hari raya
- Ekspos pengawasan tenaga kerja asing

Untuk sasaran peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan tahun 2013, diukur dari indikator kinerja angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan yang berhasil ditangani. Dengan indikator kinerja ini diharapkan terjadinya penurunan kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan.

Grafik berikut ini menggambarkan penanganan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan.

Grafik 3. Penanganan kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan :



Pada tahun 2013, dari target penanganan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan sebesar 48%, ternyata terealisasi adalah sebesar 27,84% atau persentase pencapaian sebesar 58%. Dari data ini dapat diungkapkan bahwa penanganan kasus pelanggaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan mengalami penurunan dari tahun 2012 lalu, yang mana pada tahun lalu penanganan kasus pelanggaran peraturan

ketenagakerjaan dari target 49% terealisasi sebesar 32%, yaitu yang berhasil ditangani sebesar 65%.

Sasaran 3. Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial

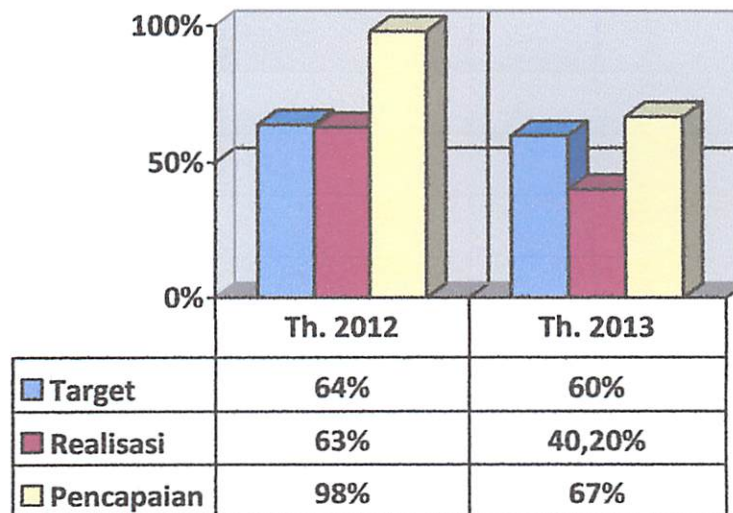
Sasaran ini dicapai melalui program-program : Pembinaan kelembagaan dan Hubungan Industrial, Perlindungan pekerja dan syarat kerja, dan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Bimtek mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di dalam dan di luar pengadilan Hubungan Industrial
- Penyelesaian perkara perselisihan Hubungan Industrial
- Penyuluhan tentang beracara di pengadilan Hubungan Industrial
- Pengembangan lembaga tim deteksi dini
- Penyuluhan pencegahan dan penyelesaian Hubungan industrial melalui bipartit
- Pengembangan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit) dan kunjungan kerja/studi banding
- Bimtek pembentukan lembaga sarana Hubungan Industrial (LKS Bipartit) di perusahaan
- Sosialisasi upah minimum (UMP/UMK)
- Bimtek tentang perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama (PP/PKB) dan pembinaan syarat kerja
- Penyuluhan tentang persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan verifikasi perusahaann penyedia jasa pekerja/buruh
- Pengembangan lembaga dewan pengupahan
- Penyuluhan tentang diskriminasi di tempat kerja

Untuk sasaran penurunan perselisihan Hubungan Industrial di Kota Balikpapan tahun 2013, diukur dari indikator kinerja penanganan terhadap kasus perselisihan Hubungan Industrial. Dengan indikator kinerja ini diharapkan terjadinya penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di perusahaan.

Adapun dari target penanganan terhadap kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 60%, ternyata realisasi pada tahun 2013 adalah sebesar 40,20% atau persentase pencapaian sebesar 67%. Pencapaian pada tahun ini, mengalami penurunan yang cukup signifikan, dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2012, dari target 64% terealisasi sebesar 63% atau pencapaian target sebesar 98%.

Grafik 4. Penanganan kasus perselisihan Hubungan Industrial :



Sasaran 4. Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan terhadap PMKS

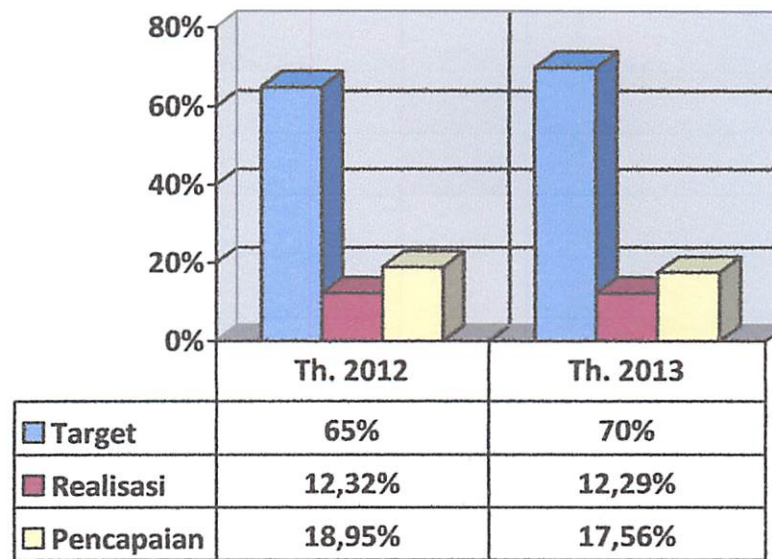
Sasaran ini dicapai melalui program-program : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dan Pembinaan panti asuhan/panti jompo, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Peningkatan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Lansia
- Rehabilitasi sosial penderita gangguan jiwa (orgil)
- Rehabilitasi gelandangan, pengemis dan orang terlantar
- Pembinaan wanita tuna susila (WTS)
- Pemulangan orang terlantar di perjalanan

Mengenai sasaran peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Balikpapan pada

tahun 2013, indikator kinerja utama yang diukur adalah angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial, dari target capaian sebesar 70% pada tahun ini baru terealisasi sebesar 12,29%. Ini berarti capaian kinerjanya hanya sebesar 17,56%. Seperti tergambar pada Grafik berikut ini :

Grafik 5. PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial :



Dibandingkan dengan tahun 2012 lalu yang tingkat pencapaiannya sebesar 18,95%, memang dari segi pencapaiannya mengalami penurunan sebesar 1,39%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa jumlah PMKS yang diberikan bantuan sebenarnya mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.582 orang, dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.150 orang, namun ternyata jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan juga mengalami penambahan yaitu sebanyak 12.879 orang, dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 11.062 orang.

Terjadinya kondisi seperti ini disebabkan beberapa faktor antara lain : karena masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk membantu penanganan terhadap PMKS, sehingga belum semua masyarakat yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut bisa dibantu.

Sasaran 5. Peningkatan Kemandirian PMKS

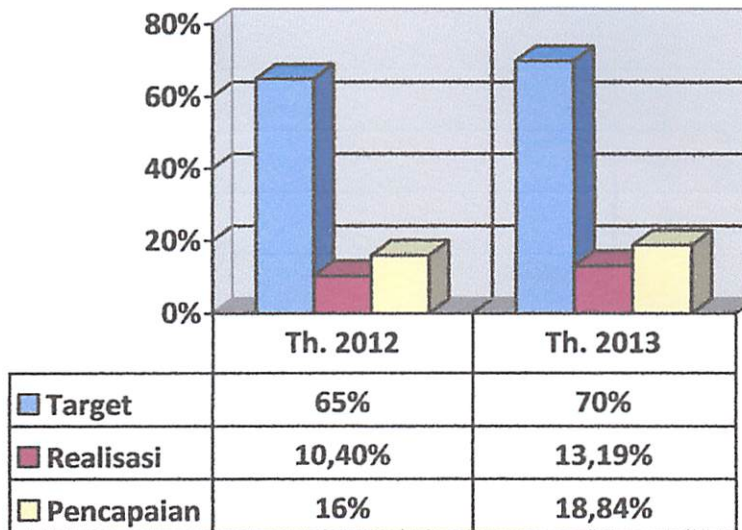
Sasaran ini dicapai melalui program-program : Pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- Pendampingan dana dekonsentrasi Askessos bagi pekerja sekr non formal
- Pelatihan pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM)
- Pembinaan taruna siaga bencana (Tagana)
- Bimtek pengurus karang taruna
- Up date data PMKS, bencana alam dan panti sosial

Pada tahun 2012, sasaran peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Balikpapan dari target sebesar 65% baru terealisasi 10,40%. Hal ini diukur dengan indikator kinerja utama adalah angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial. Ini berarti capaian kinerjanya hanya sebesar 16%.

Sedangkan pada tahun 2013, walaupun target yang ditetapkan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 70%, namun realisasinya mengalami peningkatan yaitu sebesar 13,19%, ini berarti tingkat pencapaian dari target yang ditetapkan adalah sebesar 18,84%, meningkat sebesar 2,84% dari tahun 2012. Seperti dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 6. Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial :



Pada tahun 2013 ini, titik berat peningkatan kemandirian PMKS, adalah jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, yaitu sebanyak 284 orang, sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial adalah sebanyak 2.153 orang.

Kondisi seperti ini juga masih disebabkan salah satu faktor yaitu karena masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk membantu penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tersebut. Diharapkan dengan semakin besarnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk penanganan PMKS, maka akan semakin banyak juga jumlah PMKS yang bisa dibantu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya lebih baik lagi.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

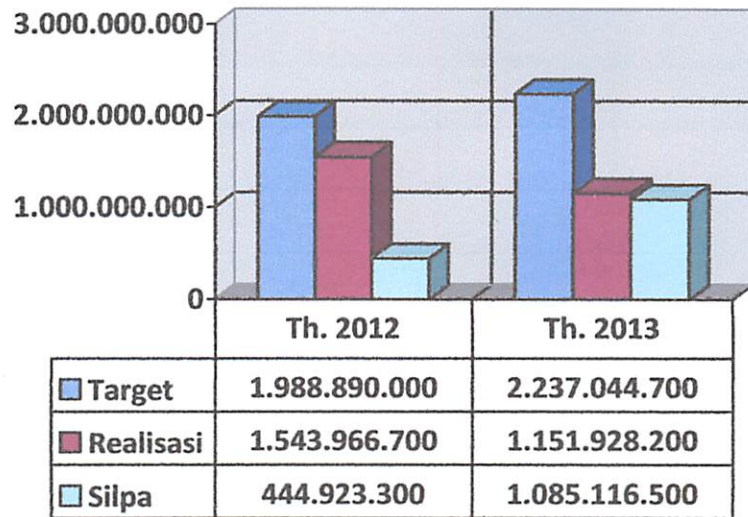
Untuk dapat mengungkapkan Akuntabilitas Keuangan, maka disajikan dalam Tabel Pengukuran Kinerja, sebagai berikut :

Sasaran 1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1. Pemagangan ke luar negeri	250,000,000	-	0.00
		2. Pelatihan Tenaga Kerja di Balikpapan	1,002,465,000	643,126,100	64.15
		3. Sosialisasi pemagangan dalam negeri	34,308,100	24,690,000	71.97
		4. Job Market Fair (JMF)	86,935,700	21,359,800	24.57

		5. Bimtek Bursa Kerja Khusus	36,999,600	8,698,500	23.51
		6. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	22,408,100	11,685,300	52.15
		7. Pemberdayaan Tenaga Kerja Sarjana dan Tenaga Kerja Skill	73,928,200	24,384,900	32.98
		8. Pelatihan Tenaga Kerja Gakin	30,000,000	269,998,600	50.94
		9. Pelatihan Tenaga Kerja UTR Level I & II	200,000,000	147,985,000	73.99
		Jumlah	2,237,044,700	1,151,928,200	51.49
	2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	1. Bimtek Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral	203,318,200	142,197,700	69.94
		2. Pengumpulan data lowongan dan penempatan	20,000,000	917,000	4.59
		3. Pelayanan antar kerja	57,640,500	36,740,800	63.74
		4. Penyuluhan dan pelayanan bimbingan jabatan	33,342,500	21,263,600	63.77
		5. Pembuatan dan penyebaran informasi pasar kerja	22,274,200	2,174,700	9.76
		6. Pendamping Tenaga Kerja Mandiri	55,000,000	-	0.00
		Jumlah	391,575,400	203,293,800	51.92

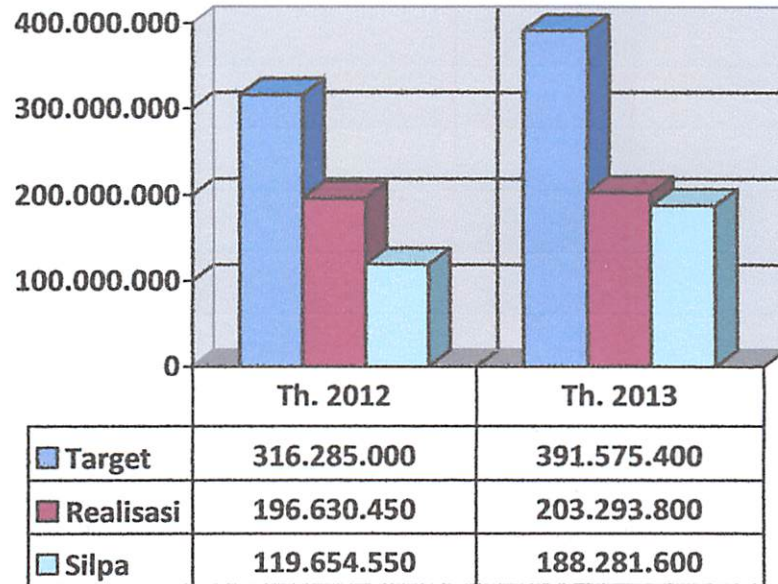
1. Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Angka Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, diselenggarakan dengan kegiatan-kegiatan, sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, dengan anggaran pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp. 2,237,044,700,- sedangkan realisasi hanya sebesar Rp. 1,151,928,200,- (51.49%), jadi ada silpa sebesar Rp. 1,085,116,500,-
Sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :



Penyerapan anggaran yang hanya 51.49% ini, dikarenakan beberapa sebab yang menjadi kendala atau hambatan, yaitu pertama karena adanya keterlambatan pembuatan Surat Keputusan Walikota Balikpapan dengan dikeluarkannya kebijakan, semua pembuatan SK kegiatan di SKPD dipusatkan di Bagian Hukum Pemkot Balikpapan, sehingga terjadi penumpukan yang mengakibatkan keterlambatan keluarnya SK kegiatan yang sebelumnya, cukup dibuat di SKPD masing-masing yang bersangkutan. Kedua, karena adanya penghematan (efisiensi) anggaran, sehingga ada beberapa pemangkasan anggaran di SKPD yang dilakukan. Namun demikian, kegiatan fisik dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang diharapkan.

2. Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Angka Tenaga Kerja yang ditempatkan di perusahaan, pada tahun 2013, diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 391,575,400,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 203,293,800,- (51.92%), sedangkan silpa sebesar Rp. 188,261,600,-

Sebagaimana terlihat pada grafik berikut :



Penyerapan anggaran yang hanya 51.49% ini, juga dikarenakan keterlambatan keluarnya SK kegiatan yang sebelumnya cukup dibuat di SKPD masing-masing yang bersangkutan. Dan karena adanya penghematan anggaran, sehingga ada beberapa pemangkasan anggaran di SKPD yang dilakukan. Walaupun kegiatan fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan.

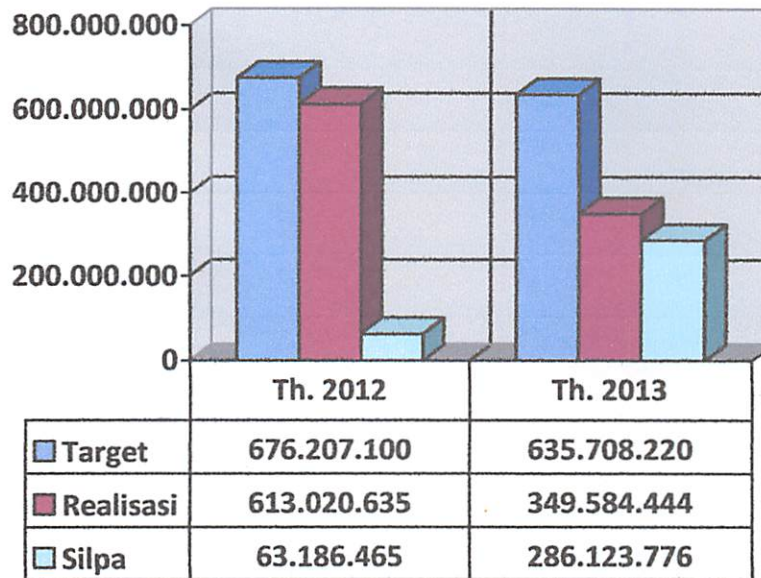
Sasaran 2. Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	1.Pemeriksaan pertama, ulang/berkala atau khusus/kasus	40,750,000	23,687,900	58.13
		2.Penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan	12,050,000	-	0.00
		3.Penerapan aturan perundangan pekerja perempuan di sektor formal	23,750,000	21,530,200	90.65
		4.Kampanye bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	82,577,200	54,040,000	65.44
		5.Pembinaan Sistem Manajemen K3 (SMK3)	33,720,000	24,625,000	73.03
		6.Pembinaan perusahaan jasa K3 (PJK3)	28,700,000	20,380,000	71.01
		7.Sosialisasi perundangan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)	34,885,000	20,990,600	60.17
		8.Penyuluhan peningkatan pemahaman program Jamsostek bagi tenaga kerja di dalam	32,500,000	26,044,000	80.14

	dan di luar hubungan kerja			
	9. Bimtek norma waktu kerja dan waktu istirahat di sektor pertambangan & migas	26,700,000	-	0.00
	10. Penyuluhan penegakan hukum norma pengupahan	62,458,200	42,645,900	68.28
	11. Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan di persh	16,184,400	14,206,919	87.78
	12. Verifikasi SP/SB Keanggotaan Kelembagaan HI	22,325,000	21,883,000	98.02
	13. Penegakan hukum berbagai peraturan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) tenaga kerja	34,122,000	18,198,900	53.33
	14. Pengawasan potensi kepesertaan program JPK di luar jamsostek	24,441,420	-	0.00
	15. Pendataan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	34,250,000	9,623,100	28.10
	16. Pengelolaan lahan parkir pusat perbelanjaan dan gedung bertingkat yang berstandar K3	31,425,000	21,830,000	69.47
	17. Pemantauan satgas tunjangan hari raya	23,020,000	7,432,825	32.29
	18. Ekspos pengawasan tenaga kerja asing	71,850,000	22,466,100	31.27
	Jumlah	635,708,220	349,584,444	54.99

Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Utama penanganan terhadap kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan, diselenggarakan sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 635,708,220,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 349,584,444,- (54.99%), ada silpa sebesar Rp. 286,123,776,-

Pada grafik berikut ini, dapat terlihat bahwa :



Penyerapan anggaran yang hanya 54.99% ini, dinilai sudah cukup memadai. Hal ini dikarenakan, walaupun terkendala oleh keterlambatan keluarnya SK kegiatan yang sebelumnya cukup dibuat di SKPD masing-masing yang bersangkutan. Dan adanya penghematan anggaran, sehingga ada beberapa pemangkasan anggaran di SKPD yang dilakukan. Namun kegiatan fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan.

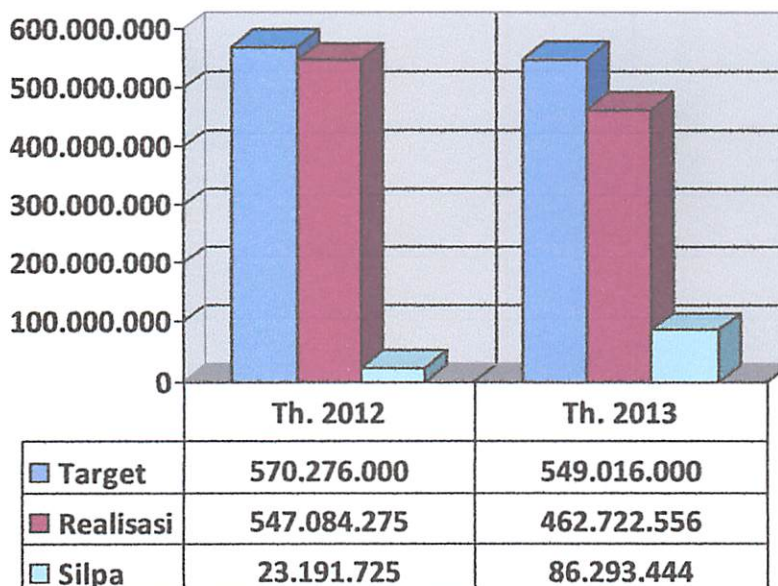
Sasaran 3. Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
3. Penurunan perselisihan Hubungan Industrial	Angka kasus perselisihan hubungan industrial	1. Penyuluhan dan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI	82,918,800	71,570,100	86.31
		2. Penyelesaian perkara perselisihan HI (Mediasi)	27,859,400	25,195,000	90.44
		3. Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	28,850,000	25,705,900	89.10
		4. Pengembangan lembaga tim deteksi dini	79,780,200	71,335,100	89.41
		5. Operasional lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit)	116,734,400	100,582,800	86.16
		6. Penyuluhan terbentuknya sarana HI (LKS Bipartit) di perusahaan	19,676,200	17,042,356	86.61
		7. Sosialisasi upah minimum (UMP/UMK)	32,550,000	21,015,900	64.56
		8. Penyuluhan tentang perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan/ perjanjian kerja bersama (PP/PKB) dan pembinaan syarat kerja	40,308,000	31,314,700	77.69
		9. Penyuluhan tentang	26,584,400	24,449,700	91.97

		persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan verifikasi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh			
		10.Operasional Dewan Pengupahan Kota Balikpapan	68,500,000	62,187,400	90.78
		11.Penyuluhan tentang diskriminasi di tempat kerja	25,254,600	12,323,600	48.80
		Jumlah	549,016,000	462,722,556	84.28

Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Utama penanganan terhadap kasus perselisihan Hubungan Industrial, diselenggarakan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 549,016,000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 462,722,556,- (84.28%), adapun silpanya sebesar Rp. 86,293,444,-

Digambarkan dari grafik berikut ini :

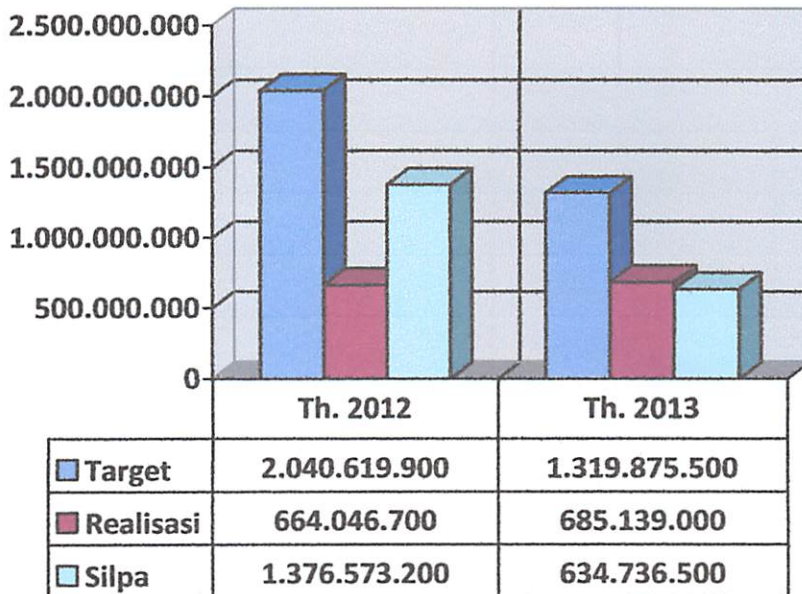


Disini penyerapan anggaran sebesar 84.28% ini, dinilai sudah cukup baik. Dikarenakan, walaupun adanya keterlambatan keluarnya SK kegiatan yang sebelumnya cukup dibuat di SKPD masing-masing yang bersangkutan. Dan adanya penghematan anggaran, sehingga ada beberapa pemangkasan anggaran di SKPD yang dilakukan. Namun kegiatan fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan dan penyerapan keuangann pun cukup tinggi.

Sasaran 4. Peningkatan Pelayanan & Perlindungan terhadap PMKS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	1.Peningkatan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial LKS Lansia	36,000,000	34,593,200	96.09
		2.Rehabilitasi sosial penderita gangguan jiwa (orgil)	97,400,000	74,080,200	76.06
		3.Rehabilitasi gelandangan, pengemis dan orang terlantar	246,555,500	183,294,600	74.34
		4.Pembinaan wanita tuna susila (WTS)	800,000,000	319,030,500	39.88
		5.Pemulangan orang terlantar di perjalanan	139,920,000	74,140,500	52.99
		Jumlah	1,319,875,500	685,139,000	51.91

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial, diselenggarakan 5 (lima) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1,319,875,500,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 685,139,000,- (51.91%). Jadi ada silpa sebesar Rp. 634,736,500,-
Terlihat dari grafik berikut ini :



Penyerapan anggaran yang hanya 51.91% ini, dikarenakan beberapa sebab yang menjadi kendala atau hambatan, yaitu pertama karena adanya keterlambatan pembuatan Surat Keputusan Walikota Balikpapan dengan

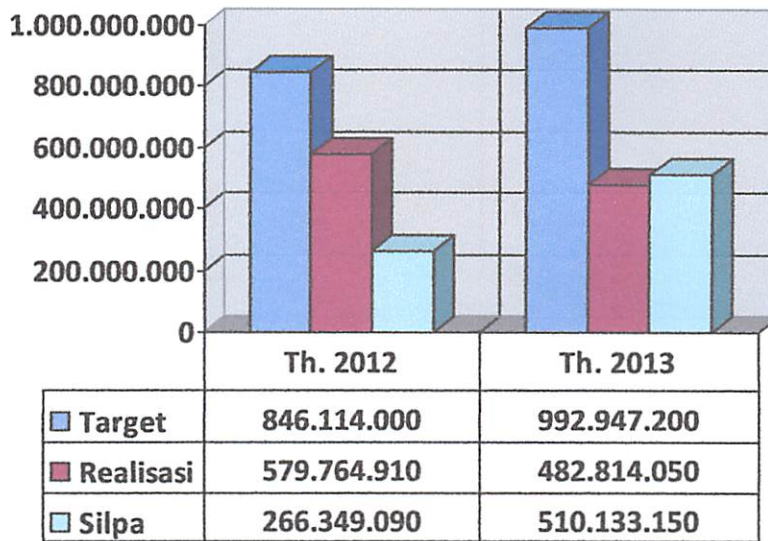
dikeluarkannya kebijakan, semua pembuatan SK kegiatan di SKPD dipusatkan di Bagian Hukum Pemkot Balikpapan, sehingga terjadi penumpukan yang mengakibatkan keterlambatan keluarnya SK kegiatan yang sebelumnya cukup dibuat di SKPD masing-masing yang bersangkutan. Kedua, karena adanya efisiensi atau penghematan anggaran, sehingga ada beberapa pemangkasan anggaran di SKPD yang dilakukan. Namun demikian, kegiatan fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan.

Sasaran 5. Peningkatan Kemandirian PMKS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5. Peningkatan kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	1. Pembinaan KUBE	75,000,000	73,424,200	97.90
		2. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	50,024,400	93,244,300	62.15
		3. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	50,000,000	35,556,400	10.16
		4. Pendampingan dana dekonsentrasi Askessos bagi pekerja sektor non formal	48,750,000	46,958,500	96.33
		5. Pelatihan pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM)	49,125,000	39,279,875	79.96
		6. Pembinaan taruna siaga bencana (Tagana)	18,004,000	115,118,800	52.81
		7. Bimtek pengurus karang taruna	53,393,800	35,544,575	66.57
		8. Up date PMKS, bencana alam dan panti sosial	48,650,000	43,687,400	89.80
		Jumlah			992,947,200

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial, diselenggarakan dengan kegiatan-kegiatan, sebanyak 8 (delapan) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 992,947,200,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 482,814,050,- (48.62%), jadi ada silpa sebesar Rp. 510,133,150,-

Grafik dibawah ini menggambarkan, bahwa :



Penyerapan anggaran yang hanya 48.62% ini, disebabkan, yaitu pertama karena adanya keterlambatan pembuatan Surat Keputusan Walikota Balikpapan dengan dikeluarkannya kebijakan, semua pembuatan SK kegiatan di SKPD dipusatkan di Bagian Hukum Pemkot Balikpapan, sehingga terjadi penumpukan yang mengakibatkan keterlambatan keluarnya SK kegiatan yang sebelumnya cukup dibuat di SKPD masing-masing yang bersangkutan. Kedua, karena adanya penghematan anggaran, sehingga ada beberapa pemangkasan anggaran di SKPD yang dilakukan. Namun demikian, kegiatan fisik dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja :

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dari target 60%, realisasi pada tahun 2013 adalah sebesar 52%, ini berarti pencapaiannya adalah sebesar 87%. Dibandingkan dengan tahun 2012 yang pencapaiannya sebesar 81%, pencapaian pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6%. Dari peningkatan pencapaian sebesar 87% tersebut dapat diungkapkan, bahwa tingkat kompetensi tenaga kerja yang ada sudah cukup tinggi dan semakin membaik dari tahun lalu.

Hal ini untuk menjawab akan kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kompetensi, sehingga untuk selanjutnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan bisa merekrut tenaga kerja lokal, karena tenaga kerja lokal sudah mempunyai kompetensi dan keahlian yang memadai seperti yang dipersyaratkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan untuk penempatan tenaga kerja di perusahaan, dari target pada tahun 2013 sebesar 55%, hanya terealisasi sebesar 21,52%, yaitu pencapaiannya adalah sebesar 39,13%. Tingkat pencapaian tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 lalu. Dari data ini dapat dilihat, bahwa penyerapan tenaga kerja di Kota Balikpapan tahun 2013 masih rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penyebab, diantaranya : 1. Karena masih kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan; 2. Upah tenaga kerja lokal masih relatif tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar Kota Balikpapan (khususnya dari pulau Jawa), sehingga masih ada perusahaan yang mengambil tenaga kerja dari luar Kota Balikpapan; 3. Ada Perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi

tenaga kerja dengan membatasi penerimaan tenaga kerja di perusahaannya.

2. Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan :

Pada tahun 2013, penanganan terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan yang ditargetkan sebesar 48%, ternyata realisasi pada tahun 2013 adalah sebesar 27,84% atau persentase pencapaian sebesar 58%. Dari data ini dapat diungkapkan bahwa penanganan kasus pelanggaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan mengalami penurunan dari tahun 2012 lalu, yang mana pada tahun lalu angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan yang berhasil ditangani sebesar 65%.

3. Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial :

Untuk sasaran penurunan perselisihan Hubungan Industrial di Kota Balikpapan tahun 2013, diukur dari indikator kinerja penanganan terhadap kasus perselisihan Hubungan Industrial. Dengan indikator kinerja ini, diharapkan terjadinya penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di perusahaan. Adapun dari target penanganan terhadap kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 60%, ternyata realisasi pada tahun 2013 adalah sebesar 40,20% atau persentase pencapaian sebesar 67%.

4. Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan terhadap PMKS :

Dibandingkan dengan tahun 2012 lalu yang tingkat pencapaiannya sebesar 18,95%, memang dari segi pencapaiannya mengalami penurunan sebesar 1,39%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa jumlah PMKS yang diberikan bantuan sebenarnya mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.582 orang, dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.150 orang, namun ternyata jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan juga mengalami pertambahan yaitu sebanyak 12.879 orang dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 11.062 orang. Terjadinya kondisi seperti ini disebabkan beberapa faktor antara lain : karena masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk membantu penanganan terhadap PMKS, sehingga

belum semua masyarakat yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut bisa dibantu.

5. Peningkatan Kemandirian PMKS :

Pada tahun 2013, dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 70%, realisasinya sebesar 13,19%, ini berarti tingkat pencapaian dari target yang ditetapkan adalah sebesar 18,84%, meningkat sebesar 2,84% dari tahun 2012.

Pada tahun 2013 ini, titik berat peningkatan kemandirian PMKS, adalah jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, yaitu sebanyak 284 orang, sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial adalah sebanyak 2.153 orang.

Kondisi seperti ini juga masih disebabkan salah satu faktor yaitu karena masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk membantu penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut. Diharapkan dengan semakin besarnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk penanganan PMKS, maka akan semakin banyak juga jumlah PMKS yang bisa dibantu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya lebih baik lagi.

B. Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.

Dengan disusunnya LAKIP Tahun 2013 ini, diharapkan dapat memacu Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Kota Balikpapan, menuju kepada manajemen organisasi yang lebih baik, akuntabel dan transparan.

Dimasa mendatang, akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi, dari seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dan dengan dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan serta masyarakat, untuk meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.

Balikpapan, 24 Februari 2013

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

KOTA BALIKPAPAN

FACHRUDDIN HARAMI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610523 198902 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2013
- Pengukuran Kinerja Tahun 2013



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Gedung Center Court Balikpapan Tennis Stadium Jalan Syarifuddin Yoes Telp. (0542) 878578 Fax (0542) 878577
BALIKPAPAN

<http://naker.balikpapan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 060.4/522 /Disnakersos

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

- Menimbang :
- a. Bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya.
 - b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan 2011-2016
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perubahan Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSRTA) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	1. Angka Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Laporan data ketenagakerjaan Bidang Pengembangan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
	2. Angka Tenaga Kerja yang ditempatkan di perusahaan	
2. Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	Laporan data Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	Angka kasus perselisihan Hubungan Industrial	Laporan data Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
4. Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	Laporan data Bidang Sosial
5. Peningkatan Kemandirian PMKS	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial	Laporan data Bidang Sosial

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Kerja (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 3 Februari 2014

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN**



FACHRUDDIN HARAMI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610523 198902 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. AMIN LATIEF**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,



MUH. AMIN LATIEF

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA

Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan
 Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	1. Pemagangan ke luar negeri 2. Pelatihan Tenaga Kerja di Balikpapan 3. Sosialisasi pemagangan dalam negeri 4. Job Market Fair (JMF) 5. Bimtek Bursa Kerja Khusus 6. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 7. Pemberdayaan Tenaga Kerja Sarjana dan Tenaga Kerja Skill 8. Pelatihan Tenaga Kerja Gakin 9. Pelatihan Tenaga Kerja UTR Level I & II	Rp 250.000.000 Rp 1.002.465.000 Rp 34.308.100 Rp 86.935.700 Rp 36.999.600 Rp 22.408.100 Rp 73.928.200 Rp 530.000.000 Rp 200.000.000
	2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	55%	1. Bimtek Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral 2. Pengumpulan data lowongan dan penempatan 3. Pelayanan antar kerja 4. Penyuluhan dan pelayanan bimbingan jabatan 5. Pembuatan dan penyebaran informasi pasar kerja 6. Pendamping Tenaga Kerja Mandiri	Rp 203.318.200 Rp 20.000.000 Rp 57.640.500 Rp 33.342.500 Rp 22.274.200 Rp 55.000.000
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	48%	1. Pemeriksaan pertama, ulang/berkala atau khusus/kasus 2. Penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan 3. Penerapan aturan perundangan pekerja perempuan di sektor formal 4. Kampanye bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5. Pembinaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) 6. Pembinaan perusahaan jasa K3 (PJK3) 7. Sosialisasi perundangan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) 8. Penyuluhan peningkatan pemahaman program Jamsostek bagi tenaga kerja di dalam dan di luar hubungan kerja 9. Bimtek norma waktu kerja dan waktu istirahat di sektor pertambangan & migas 10. Penyuluhan penegakan hukum norma pengupahan	Rp 40.750.000 Rp 12.050.000 Rp 23.750.000 Rp 82.577.200 Rp 33.720.000 Rp 28.700.000 Rp 34.885.000 Rp 32.500.000 Rp 26.700.000 Rp 62.458.200

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
			11. Penyuluhan kondisi ketenagakerjaan	Rp 16.184.400
			12. Verifikasi SP/SB Keanggotaan Kelembagaan HI	Rp 22.325.000
			13. Penegakan hukum berbagai peraturan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) tenaga kerja	Rp 34.122.000
			14. Pengawasan potensi kepesertaan program JPK di luar jamsostek	Rp 24.441.420
			15. Pendataan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	Rp 34.250.000
			16. Pengelolaan lahan parkir pusat perbelanjaan dan gedung bertingkat yang berstandar K3	Rp 31.425.000
			17. Pemantauan satgas tunjangan hari raya	Rp 23.020.000
			18. Ekspos pengawasan tenaga kerja asing	Rp 71.850.000
3. Penurunan perselisihan Hubungan Industrial	Angka kasus perselisihan hubungan industrial	60%	1. Penyuluhan dan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI	Rp 82.918.800
			2. Penyelesaian perkara perselisihan HI (Mediasi)	Rp 27.859.400
			3. Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	Rp 28.850.000
			4. Pengembangan lembaga tim deteksi dini	Rp 79.780.200
			5. Operasional lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit)	Rp 116.734.400
			6. Penyuluhan terbentuknya sarana HI (LKS Bipartit) di perusahaan	Rp 19.676.200
			7. Sosialisasi upah minimum (UMP/UMK)	Rp 32.550.000
			8. Penyuluhan tentang perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan/ perjanjian kerja bersama (PP/PKB) dan pembinaan syarat kerja	Rp 40.308.000
			9. Penyuluhan tentang persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan verifikasi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	Rp 26.584.400
			10. Operasional Dewan Pengupahan Kota Balikpapan	Rp 68.500.000
			11. Penyuluhan tentang diskriminasi di tempat kerja	Rp 25.254.600
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	70%	1. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Lansia	Rp 36.000.000
			2. Rehabilitasi sosial penderita gangguan jiwa (orgil)	Rp 97.400.000
			3. Rehabilitasi gelandangan, pengemis dan orang terlantar	Rp 246.555.500
			4. Pembinaan wanita tuna susila (WTS)	Rp 800.000.000
			5. Pemulangan orang terlantar di perjalanan	Rp 139.920.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
5. Peningkatan kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	70%	1. Pembinaan KUBE	Rp 75.000.000
			2. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Rp 150.024.400
			3. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Rp 350.000.000
			4. Pendampingan dana dekonsentrasi Askessos bagi pekerja sektor non formal	Rp 48.750.000
			5. Pelatihan pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM)	Rp 49.125.000
			6. Pembinaan taruna siaga bencana (Tagana)	Rp 218.004.000
			7. Bimtek pengurus karang taruna	Rp 53.393.800
			8. Up date PMKS, bencana alam dan panti sosial	Rp 48.650.000

Total : Rp 6.126.167.020
Total Semua Anggaran : Rp 8.545.781.210

Walikota Balikpapan,

H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 7 Januari 2013
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan



Drs. Muh. Amin Latief, M.Si
NIP. 19571012 198503 1 012

PENGUKURAN KINERJA

Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan
 Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	52%	87%	1. Pemagangan ke luar negeri 2. Pelatihan Tenaga Kerja di Balikpapan 3. Sosialisasi pemagangan dalam negeri 4. Job Market Fair (JMF) 5. Bimtek Bursa Kerja Khusus 6. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 7. Pemberdayaan Tenaga Kerja Sarjana dan Tenaga Kerja Skill 8. Pelatihan Tenaga Kerja Gakin 9. Pelatihan Tenaga Kerja UTR Level I & II	Rp 250.000.000	Rp -	0,00
						Rp 1.002.465.000	Rp 643.126.100	64,15
						Rp 34.308.100	Rp 24.690.000	71,97
						Rp 86.935.700	Rp 21.359.800	24,57
						Rp 36.999.600	Rp 8.698.500	23,51
						Rp 22.408.100	Rp 11.685.300	52,15
						Rp 73.928.200	Rp 24.384.900	32,98
						Rp 530.000.000	Rp 269.998.600	50,94
						Rp 200.000.000	Rp 147.985.000	73,99
	2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	55%	21,52%	39,13%	1. Bimtek Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral	Rp 203.318.200	Rp 142.197.700	69,94
					2. Pengumpulan data lowongan dan penempatan	Rp 20.000.000	Rp 917.000	4,59
					3. Pelayanan antar kerja	Rp 57.640.500	Rp 36.740.800	63,74
					4. Penyuluhan dan pelayanan bimbingan jabatan	Rp 33.342.500	Rp 21.263.600	63,77
					5. Pembuatan dan penyebaran informasi pasar kerja	Rp 22.274.200	Rp 2.174.700	9,76
					6. Pendamping Tenaga Kerja Mandiri	Rp 55.000.000	Rp -	0,00
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	48%	27,84%	58%	1. Pemeriksaan pertama, ulang/berkala atau khusus/kasus	Rp 40.750.000	Rp 23.687.900	58,13
					2. Penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan	Rp 12.050.000	Rp -	0,00
					3. Penerapan aturan perundangan pekerja perempuan di sektor formal	Rp 23.750.000	Rp 21.530.200	90,65
					4. Kampanye bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Rp 82.577.200	Rp 54.040.000	65,44
					5. Pembinaan Sistem Manajemen K3 (SMK3)	Rp 33.720.000	Rp 24.625.000	73,03
					6. Pembinaan perusahaan jasa K3 (PJK3)	Rp 28.700.000	Rp 20.380.000	71,01
					7. Sosialisasi perundangan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)	Rp 34.885.000	Rp 20.990.600	60,17
					8. Penyuluhan peningkatan pemahaman program Jamsostek bagi tenaga kerja di dalam dan di luar hubungan kerja	Rp 32.500.000	Rp 26.044.000	80,14
					9. Bimtek norma waktu kerja dan waktu istirahat di sektor pertambangan & migas	Rp 26.700.000	Rp -	0,00
					10. Penyuluhan penegakan hukum norma pengupahan	Rp 62.458.200	Rp 42.645.900	68,28
					11. Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan di persh	Rp 16.184.400	Rp 14.206.919	87,78

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
					12. Verifikasi SP/SB Keanggotaan Kelembagaan HI	Rp 22.325.000	Rp 21.883.000	98,02
					13. Penegakan hukum berbagai peraturan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) tenaga kerja	Rp 34.122.000	Rp 18.198.900	53,33
					14. Pengawasan potensi kepesertaan program JPK di luar jamsostek	Rp 24.441.420	Rp -	0,00
					15. Pendataan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	Rp 34.250.000	Rp 9.623.100	28,10
					16. Pengelolaan lahan parkir pusat perbelanjaan dan gedung bertingkat yang berstandar K3	Rp 31.425.000	Rp 21.830.000	69,47
					17. Pemantauan satgas tunjangan hari raya	Rp 23.020.000	Rp 7.432.825	32,29
					18. Ekspos pengawasan tenaga kerja asing	Rp 71.850.000	Rp 22.466.100	31,27
3. Penurunan perselisihan Hubungan Industrial	Angka kasus perselisihan hubungan industrial	60%	40,20%	67%	1. Penyuluhan dan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI	Rp 82.918.800	Rp 71.570.100	86,31
					2. Penyelesaian perkara perselisihan HI (Mediasi)	Rp 27.859.400	Rp 25.195.000	90,44
					3. Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	Rp 28.850.000	Rp 25.705.900	89,10
					4. Pengembangan lembaga tim deteksi dini	Rp 79.780.200	Rp 71.335.100	89,41
					5. Operasional lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit)	Rp 116.734.400	Rp 100.582.800	86,16
					6. Penyuluhan terbentuknya sarana HI (LKS Bipartit) di perusahaan	Rp 19.676.200	Rp 17.042.356	86,61
					7. Sosialisasi upah minimum (UMP/UMK)	Rp 32.550.000	Rp 21.015.900	64,56
					8. Penyuluhan tentang perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama (PP/PKB) dan pembinaan syarat kerja	Rp 40.308.000	Rp 31.314.700	77,69
					9. Penyuluhan tentang persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan verifikasi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	Rp 26.584.400	Rp 24.449.700	91,97
					10. Operasional Dewan Pengupahan Kota Balikpapan	Rp 68.500.000	Rp 62.187.400	90,78
					11. Penyuluhan tentang diskriminasi di tempat kerja	Rp 25.254.600	Rp 12.323.600	48,80

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	70%	12,29%	17,56%	1. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Lansia	Rp 36.000.000	Rp 34.593.200	96,09
					2. Rehabilitasi sosial penderita gangguan jiwa (orgil)	Rp 97.400.000	Rp 74.080.200	76,06
					3. Rehabilitasi gelandangan, pengemis dan orang terlantar	Rp 246.555.500	Rp 183.294.600	74,34
					4. Pembinaan wanita tuna susila (WTS)	Rp 800.000.000	Rp 319.030.500	39,88
					5. Pemulangan orang terlantar di perjalanan	Rp 139.920.000	Rp 74.140.500	52,99
5. Peningkatan kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	70%	13,19%	18,84%	1. Pembinaan KUBE	Rp 75.000.000	Rp 73.424.200	97,90
					2. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Rp 150.024.400	Rp 93.244.300	62,15
					3. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Rp 350.000.000	Rp 35.556.400	10,16
					4. Pendampingan dana dekonsentrasi Askessos bagi pekerja sektor non formal	Rp 48.750.000	Rp 46.958.500	96,33
					5. Pelatihan pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM)	Rp 49.125.000	Rp 39.279.875	79,96
					6. Pembinaan taruna siaga bencana (Tagana)	Rp 218.004.000	Rp 115.118.800	52,81
					7. Bimtek pengurus karang taruna	Rp 53.393.800	Rp 35.544.575	66,57
					8. Up date PMKS, bencana alam dan panti sosial	Rp 48.650.000	Rp 43.687.400	89,80

Total : Rp 6.126.167.020
Total Semua Anggaran : Rp 8.545.781.210

Balikpapan, 24 Februari 2014
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan



Fachruddin Harami
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198902 1 003